



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2020

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA





**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
TAHUN 2020**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2021**

*Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun
2020*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2020 dalam mendukung capaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Jakarta, Maret 2021
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan
Informatika



Edwin J.H. Wuisang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Keasistendeputian Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi dalam kurun waktu 2 (dua) Periode yakni Periode Januari – September 2020 dengan Satu Sasaran yakni *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”* dengan 3 Indikator Kinerja dan Periode Oktober – Desember 2020 dengan Dua Sasaran yakni *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”* dengan 2 Indikator Kinerja dan Sasaran *“Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”* dengan 2 Indikator Kinerja.

Realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 untuk mencapai sasaran kegiatan *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”* dan pada bulan Januari sampai dengan September 2020 berhasil mencapai **nilai rata-rata 97,22%** yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **97,05%** (132 dari 136 rancangan rekomendasi disetujui Deputi)

- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **97,61%** (41 dari 42 rancangan rekomendasi disetujui Deputi)
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **97,36%** (37 dari 38 rancangan rekomendasi disetujui Deputi)

Sedangkan untuk realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika bulan September sampai dengan Desember tahun 2020 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 100%**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%** (22 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet)
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%** (3 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet)
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%** (5 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet)

- d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%** (7 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet)

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020 mencapai Rp 393.813.350 atau setara 99,85% dari total pagu anggaran atau Rp 394.266.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 452.650 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 dan 2021.....	15
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 dan 2021	19
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	65
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN	71
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja TW I - III	71
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja TW IV	73
Lampiran 3 : Dashboard SIKT TW I – III.....	76
Lampiran 4 : Dashboard SIKT TW IV.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia.....	10
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Januari-September 2020.....	16
Tabel 2.2 : Target dan Indikator Kinerja Oktober-Desember 2020.....	18
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Januari-September 2020.....	19
Tabel 2.4 : (Draft) Indikator Kinerja Utama Oktober-Desember 2020.....	20
Tabel 2.5 : Rencana Kerja Tahun 2020.....	23
Tabel 2.6 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020.....	25
Tabel 3.1 : Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Jan-Sept 2020)	27
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020).....	28
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020).....	42
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020).....	48
Tabel 3.5 : Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Okt-Des 2020)..	52
Tabel 3.6 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Okt-Des 2020).....	54
Tabel 3.7 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2020 (Okt-Des 2020).....	56
Tabel 3.8 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Okt-Des 2020).....	58
Tabel 3.9 : Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2020 (Okt-Des 2020).....	59
Tabel 3.10 : Sasaran dan Indikator PK Bidang FO Tahun 2020.....	61
Tabel 3.11 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2020	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep Hankaminfo (Jan-Sept 2020).....	9
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Asdep Hankaminfo (Okt-Des 2020).....	9
Gambar 3.1 : Surat Permohonan Dukungan Wakil Ketua SCWCAA & HB.....	30
Gambar 3.2 : Pelaksanaan FGD Virtual TKMPP	31
Gambar 3.3 : Penyelenggaraan Rakor Tindak Lanjut Mengenai Alutsista.....	32
Gambar 3.4 : Pelaksanaan Rakor Khusus Alutsista di Kemenko Polhukam.....	33
Gambar 3.5 : Laporan Progres Pembangunan Kapal Selam per Juni 2020.....	35
Gambar 3.6 : Izin Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kepresidenan.....	37
Gambar 3.7 : Hasil Rakorsus Mengenai Antisipasi Karhutla.....	39
Gambar 3.8 : Izin Prinsip Pembangunan Gedung LPP RRI.....	40
Gambar 3.9 : Pelaksanaan Rapat Penyusunan Keppres di Kemhan.....	43
Gambar 3.10 : Pelaksanaan Rapat Tim Kecil RPerpres di Kemenkumham.....	44
Gambar 3.11 : RInpres Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla.....	45
Gambar 3.12 : Hasil Rapat RPermen Tata Kelola PSE Lingkup Privat.....	46
Gambar 3.13 : Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres PIIKN.....	47
Gambar 3.14 : Bahan Rapat Internal Percepatan Pembangunan Ekonomi.....	49
Gambar 3.15 : Infografis Butir Wicara Hari Pers Nasional 2020.....	50
Gambar 3.16 : Bahan Ratas Persiapan Penyelenggaraan GPDRR.....	51
Gambar 3.17 : Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X.....	55
Gambar 3.18 : Perbandingan Jumlah Output Tiga Tahun.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2020.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai diantaranya tujuan dan sasaran organisasi; pencapaian target kinerja organisasi; capaian kinerja; serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2020 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2020. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan menggunakan instrumen

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 59-60, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu **Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan, dan Bidang Komunikasi dan Informatika**. Masing-masing Bidang dibagi dalam dua Sub Bidang. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pertahanan

Subbidang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan.

2) Subbidang Keamanan

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

B. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan:

- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Kesatuan Bangsa

Subbidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

2) Subbidang Wilayah Perbatasan

Subbidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis

dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang wilayah perbatasan.

C. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi dan Informatika terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik

Subbidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelayanan informasi publik.

2) Subbidang Telekomunikasi dan Informatika

Subbidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang telekomunikasi dan informatika.

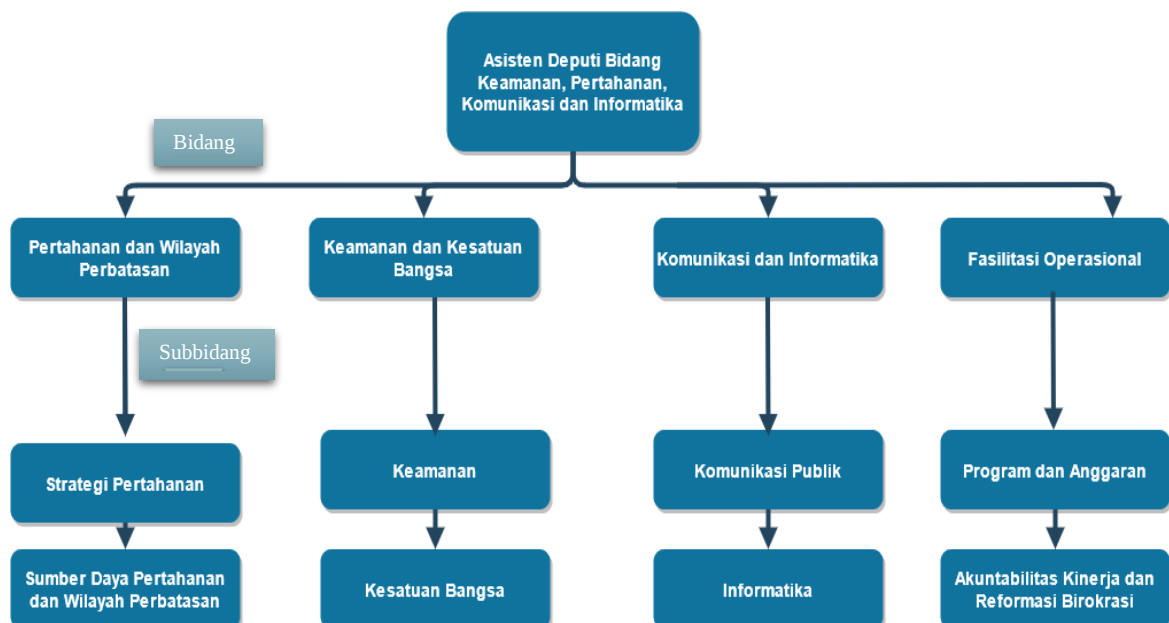
Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk Januari hingga September dapat digambarkan sebagai berikut, juga disertakan bagan pengubahan struktur organisasi untuk Oktober hingga Desember tahun 2020.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Januari - September 2020)



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2018)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Oktober – Desember 2020)



Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2020)

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 20 orang dengan komposisi terdiri dari: 12 pejabat struktural, 8 staf analis dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang tercatat per-31 Desember 2020 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/d	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	3	Kepala Bidang	4	3	-	-	-	3	1	2	3
IV/a	1			1	-	-	-	1		1	1
III/d	3	Kepala Subbidang	7	2	1	-	-	3	1	2	3
III/c	4			2	2	-	-	4	2	2	4
III/a	8	Analisis	8	-	7	1	-	8	4	4	8
Jmlh	20		20	9	10	1	-	20	8	12	20

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2020)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki posisi netral dan bebas dari kepentingan apapun sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor, atau Kementerian/Lembaga manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan dinamika bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika perlu

mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, yakni politik, ekonomi, sosial, serta teknologi yang mempengaruhi perkembangan isu di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika adalah: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan, serta koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun Kementerian/Lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keasisten Deputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu dukungan prasarana teknologi juga belum sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada Mei 2020.

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021

Periode Januari s.d. September 2020

Pada awal tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika. Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

**Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika
Periode Januari s.d. September 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika keamanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rancangan rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan,

komunikasi, dan informatika harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pada awal bulan Oktober 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menetapkan kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk 3 bulan kedepan yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, terdapat 2 (dua) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

- | | |
|--------------------|--|
| SASARAN 1 : | TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| SASARAN 2 : | TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Kedua Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **4 (empat) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika. Keempat indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika
Periode Oktober s.d. Desember 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Polhukam	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahun 2020 sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020 (Oktober – Desember) untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020.

B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dan 2021

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2020 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Periode Januari - September 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asdep Hankaminfo yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Periode Oktober – Desember 2020

Untuk Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada periode Oktober - Desember 2020 belum ditetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, saat ini masih berupa draft yang tetap masih dapat digunakan yakni:

Tabel 2.4
(Draft)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Periode Oktober - Desember 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
		b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan

		informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	a. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan
		b. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Polhukam	a. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu
		b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

		c. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu
		d. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

C.RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2020 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun 2020
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	115 rancangan rekomendasi	100	Rp 1.021.034.000
	2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	10 rancangan rekomendasi	100	Rp 38.424.000
	3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	7 rancangan rekomendasi	100	Rp. 18.042.000
		TOTAL	132		1.077.500.000

Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran
(Sekretariat Kabinet) Tahun 2020

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 didukung alokasi anggaran Rp. 1.077.500.000,- untuk mendukung pencapaian target keluaran (*output*) yang mencakup tiga komponen yaitu:

1. **Komponen (1) “Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
2. **Komponen (2) “Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengesahan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
3. **Komponen (3) “Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat terbatas tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan kunjungan kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam dan luar negeri.

Sebagai catatan, pada pertengahan tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan beberapa kali revisi anggaran untuk melaksanakan kebijakan yang baru diputuskan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka *refocussing* anggaran (pemotongan) untuk penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika tahun 2020 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2020, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Komponen Kegiatan	Alokasi 2019	Pagu Revisi
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 1.021.034.000	Rp 376.864.000
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 38.424.000	Rp 12.212.000
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 18.042.000	Rp 5.190.000
	TOTAL	Rp 1.077.500.000	Rp 394.266.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

Pengukuran Capaian Periode Januari- September 2020

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari-September 2020, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. *Output* yang dihasilkan adalah **216 rancangan rekomendasi** yang terdiri dari: **136** rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **42** rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan **38** rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Jumlah *output* **216 rancangan rekomendasi** yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada periode Januari sampai dengan September Tahun 2020 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak **210 rancangan rekomendasi** yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 mencapai 97,22%** sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Jan-Sept 2020)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Target	Realisasi Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	216 Rancangan	100%	97,05%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	42 Rancangan	100%	97,61%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	38 Rancangan	100%	97,36%

Capaian Sasaran Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Indikator Kinerja (1)

“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”

Realisasi Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan **output 136 rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dari seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak **132 rancangan rekomendasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 97,05%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020)

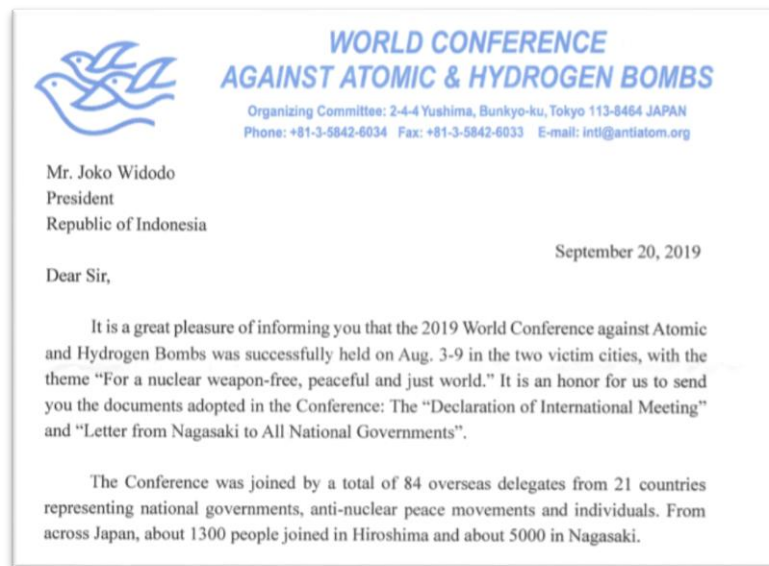
Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	132 rancangan rekomendasi	100%	97,05%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	136 rancangan rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1) Permohonan Dukungan Presiden RI terhadap *World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs*

Wakil Ketua *Steering Committee World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs* (WCAAHB), bersurat kepada Presiden RI memohon dukungan Pemerintah RI atas pelaksanaan WCAAHB yang pada tahun 2019 telah berhasil mendorong negara-negara dunia agar segera meratifikasi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, mengimplementasikan *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, menghentikan segera aktivitas memperkuat persenjataan nuklir, dan mendukung kerja sama internasional dalam rangka menentang peperangan dan penggunaan senjata nuklir. Atas permohonan tersebut, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan berkoordinasi bersama Menlu dan BATAN melaporkan bahwa RI selama ini berposisi mendukung upaya penghapusan senjata nuklir dalam forum-forum internasional dan berpendapat bahwa WCAAHB merupakan forum dengan profil positif yang selaras dengan kebijakan diplomasi luar negeri RI.

Gambar 1. Surat permohonan dukungan dari Wakil Ketua Steering Committee World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs kepada Presiden RI



2) Laporan Kegiatan Menhan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menhan ke Luar Negeri

Guna merealisasikan arahan Presiden RI pada Ratas tanggal 27 Januari 2020 di PT PAL tentang kebijakan pengembangan Alutsista, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika rutin memonitor dan melaporkan laporan kegiatan bulanan Menhan maupun hasil kunjungan kerja Menhan ke luar negeri selama periode Januari-September 2020, terutama yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan atau pengadaan Alutsista, diantaranya kunjungan kerja ke Turki, RRT, Jepang, Filipina, Uni Emirat Arab, Rusia, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kemudian merangkum data-data dan capaian hasil kegiatan dan kunjungan kerja Menhan ke dalam sebuah matriks kompilasi.

3) Rapat Pelaksana Harian dan *Focus Group Discussion* bersama Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Kepala Bidang Pertahanan dan Keamanan, Setkab merupakan salah satu anggota tim pelaksana harian Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (TKMPP), maka dari itu selama periode bulan Januari-September 2020 rutin memberikan kontribusi pada rapat pelaksana harian

TKMPP, yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual sebanyak 4 kali. Selain itu, Setkab juga hadir mengikuti 2 kegiatan FGD dengan fokus pembahasan antisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan Misi Perdamaian PBB.

Sepanjang Januari-September 2020, pelaksanaan kegiatan Misi Perdamaian PBB mengalami beberapa kendala akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga TKMPP perlu melakukan beberapa langkah-langkah khusus untuk mengantisipasi. Namun, secara keseluruhan TKMPP telah berhasil melaksanakan tugas menjadi pilar diplomasi dalam menjaga kepentingan serta *leverage* RI dalam forum internasional, dengan terus menjaga posisi RI tetap menjadi 10 besar negara kontributor *peacekeeping* PBB disertai intervensi kebijakan melalui berbagai prakarsa dalam forum global.

Gambar 2. Pelaksanaan FGD Virtual TKMPP dengan topik “Antisipasi Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Misi Perdamaian PBB”.



4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengembangan Alutsista

Dalam rangka menindaklanjuti arahan-arahan Presiden pada Ratas tanggal 27 Januari 2020 di PT PAL, Setkab mengundang jajaran direksi dari 4 BUMN Industri Pertahanan untuk melakukan rapat koordinasi pada tanggal 27 dan 28 Februari 2020, yang dipimpin oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah merangkum dan melaporkan kepada Setkab

segala capaian, isu strategis, serta kebutuhan BUMN Indhan strategis sebagai sebagai bahan kebijakan dalam rangka realisasi arahan Presiden pada Ratas tanggal 27 Januari 2020.

Gambar 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Alutsista di Setkab pada tanggal 27-28 Februari 2020.



5) Rapat Koordinasi Khusus tentang Perkembangan Pengadaan Alutsista

Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang perkembangan pengadaan Alutsista, berdasarkan undangan dari Menko Bidang Polhukam. Rakorsus membahas perkembangan terakhir pengadaan Alutsista dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas tanggal 27 Januari 2020 tentang kebijakan pengembangan Alutsista, khususnya *progress* terakhir pengadaan Sukhoi S-35 dari Rusia. Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Seskab dengan rekomendasi bahwa pengadaan dapat dipertimbangkan secara positif dengan memperhatikan kebijakan *Generalized System of Preferences* dari AS, skema pembayaran alternatif, potensi sanksi CAATSA, serta arahan-arahan Presiden terkait sebelumnya.

Gambar 4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Khusus Alutsista di Kemenko Polhukam pada tanggal 26 Februari 2020.



6) Kajian Membangun Sistem Pertahanan Negara dalam Menghadapi Potensi Ancaman Nirmiliter Seperti Wabah Penyakit Menular

Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang melanda RI pada awal tahun 2020 dan mulai berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kajian dengan judul “*Membangun Sistem Pertahanan Negara dalam Menghadapi Potensi Ancaman Nirmiliter Seperti Wabah Penyakit Menular*”. Dalam kajian, dilaporkan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian besar karena berimplikasi melemahkan pertahanan nirmiliter dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 seperti minimnya laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19, jumlah pertumbuhan kasus positif Covid-19, serta lemahnya inovasi dan kesiagaan sumber daya litbang kesehatan. Pada akhir kajian, Setkab memberikan rekomendasi:

- a) Ancaman nirmiliter penting mendapat perhatian agar Indonesia selalu siaga, antisipatif, serta mampu memulihkan keadaan secara mandiri.
- b) Perlu membangun sistem pertahanan nirmiliter dengan menggerakkan seluruh komponen kekuatan bangsa, yang dituangkan sebagai unsur penting dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) yang setiap 5 tahun ditetapkan Presiden melalui Perpres.

7) Laporan Kinerja Tim Pelaksana dan Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada tanggal 18 Mei 2020 melaporkan hasil kegiatan Tim Pelaksana (Timlak) dan Staf Ahli (Sahli) KKIP sejak tahun 2016 hingga demisioner pada bulan Februari 2020. Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Komunikasi, dan Informatika meneruskan laporan tersebut kepada Presiden RI dengan memberikan catatan bahwa kinerja KKIP sepanjang kurun waktu tersebut cukup baik. Namun, masih terdapat 3 permasalahan strategis yang perlu segera dituntaskan, yaitu keberlanjutan 7 program prioritas KKIP, belum adanya Rencana Induk dan *road map* Industri Pertahanan, serta belum ditetapkannya beberapa rancangan peraturan yang meriupakan amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Untuk itu, Setkab berpendapat bahwa Presiden sekiranya perlu menyelenggarakan dan memimpin siding KKIP serta perlu memberikan arahan kepada Menhan untuk segera mengangkat pejabat baru Timlak dan Sahli KKIP.

8) Rekomendasi atas Permohonan Perubahan Susunan Organisasi TNI

Sepanjang Januari-September 2020, tercatat bahwa Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah beberapa kali melaporkan permohonan-permohonan Kemhan/TNI yang berimplikasi pada perubahan susunan organisasi TNI, antara lain: permohonan penambahan 14 jabatan Kolonel di Lingkungan TNI, permohonan persetujuan Izin Prakarsa Presiden atas penyusunan RPerpres tentang perubahan susunan organisasi TNI, permohonan perubahan susunan organisasi di lingkungan TNI AD, serta usulan validasi organisasi TNI AL.

Adapun dalam setiap permohonan tersebut, Setkab tegas berposisi dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kemhan dan TNI perlu terlebih dahulu menyelesaikan *grand design* organisasi TNI yang disinergikan dengan penataan gelar kekuatan TNI dan selaras dengan pembangunan nasional serta diproyeksikan jauh ke depan sesuai dengan arahan Presiden.

- b) Kemhan dan TNI perlu mengkaji dan memperhatikan implikasi peningkatan kepegangatan serta pembentukan jabatan atau satuan baru, terutama terhadap anggaran belanja modal TNI.
- c) Permohonan yang berimplikasi pada perubahan susunan organisasi TNI sebaiknya tidak diajukan secara parsial serta dilengkapi dengan naskah urgensi dan data dukung yang lengkap.

9) Laporan Perkembangan Terkini Program Kerja Sama Pembangunan Kapal Selam U-209 Antara RI-Korea Selatan

Pada bulan Juli 2020, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan PT PAL menyampaikan kronologi serta perkembangan terkini terkait pelaksanaan program kerja sama pembangunan Kapal Selam U-209 antara RI-Korsel kepada Seskab. Berdasarkan perkembangan terkini s.d. Juni 2020, disampaikan rekomendasi bahwa Menhan selaku pelaksana program didukung PT PAL selaku pelaksana teknis operasional perlu melaporkan perkembangan realisasi pembangunan Kapal Selam berikut pemanfaatan pembiayaan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan Presiden terkait kelanjutan program tersebut.

Gambar 5. Laporan Progress Pembangunan Kapal Selam per Juni 2020 dari PT PAL.



10)Permohonan Tambahan Anggaran untuk Percepatan Pengadaan Alutsista TNI-AL dan Kajian Dinamika Tantangan Kinerja Pelaksanaan Tugas TNI AL

Menhan melalui surat no: R/310/M/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 mohon direktif Presiden atas usul permintaan tambahan anggaran dari alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08 (BA-BUN) sebesar Rp.1,25 Triliun untuk percepatan pengadaan Alutsista bagi TNI AL TA. 2020. Dalam rangka penyusunan rekomendasi serta untuk mengetahui kesiapan alokasi anggaran, Seskab terlebih dahulu meminta pertimbangan tertulis Menkeu atas permohonan Menhan tersebut. Selain itu, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan koordinasi dengan Mabes TNI dan Bappenas untuk meminta klarifikasi serta data dukung terkait guna penyusunan rekomendasi yang lebih akurat.

Setelah pertimbangan Menkeu dan hasil koordinasi didapat, Setkab melaporkan permohonan Menhan tersebut kepada Presiden dengan catatan layak untuk dipertimbangkan secara positif, namun tetap mengarahkan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan yang mengutamakan produk dalam negeri serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 16 Tahun 2012.

Dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan Presiden atas permohonan Menhan dimaksud, Setkab juga menyusun sebuah kajian dengan tajuk "*Dinamika Tantangan Kinerja Pelaksanaan Tugas TNI-AL*" mencakup identifikasi permasalahan TNI AL (personel, sarana prasarana, anggaran, serta Alutsista), dasar hukum serta arahan Presiden, dan hasil koordinasi dengan Bappenas tentang realisasi belanja Alutsista. Hasil kajian menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi strategis berupa politik anggaran yang bersifat non-reguler dari Menkeu dengan persetujuan Presiden, disertai perubahan nyata skema/formula kebijakan Menhan dalam membagi alokasi anggaran di 5 UO Kemhan-TNI

11)Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kepresidenan di Jl. Veteran III Jakarta Pusat

Mensesneg kepada Presiden menyampaikan permohonan izin pembangunan gedung kantor di lingkungan Istana Kepresidenan yang telah

berusia lebih dari 35 tahun (gedung kantor Kemensetneg dibangun tahun 1984). Permohonan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Seskab kepada Mensesneg, intinya agar segera melengkapi dokumen yang diperlukan apabila tetap bermaksud melanjutkan permohonan izin pembangunan gedung dimaksud.

Gambar 6. Surat Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kepresidenan



12) Rekomendasi Mitigasi Kegagalan Peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2)

Menko Polhukam kepada Menkominfo (tembusan kepada Presiden) menyampaikan hasil analisa atas kegagalan peluncuran SN-2 pada tanggal 9 April 2020 dari *Xichang Satellite Launch Center*. Posisi satelit pada orbit 113° BT sangat strategis baik secara geopolitik dan geoeкономи sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara serius. Karena itu, Menkominfo dan Ooredoo Indosat serta PT Pasifik Satelit Nusantara telah menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek terhadap kelanjutan layanan Palapa-D berupa migrasi layanan dan data pelanggan ke satelit milik Telkom untuk memastikan tidak terjadinya interupsi pelayanan satelit kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga penyiaran sehingga layanan penyiaran tetap tersedia dengan lancar ke seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan regulasi satelit internasional dalam hal penggunaan *filling* satelit Indonesia, Kemenkominfo telah melapor ke *International Telecommunication Union* terkait gagal orbit SN-2 dan meminta agar Indonesia diberikan status *force majeure* sehingga slot orbit 113° BT tetap menjadi milik Indonesia.

13)a. Laporan Partisipasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Forum Internasional terkait Transformasi Digital

b. Laporan Rencana Percepatan Digitalisasi Nasional

Menkominfo menyampaikan surat kepada Presiden terkait Laporan Percepatan Transformasi Digital sebagai tindak lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Intern tanggal 29 Juli 2020 tentang Penajaman Program/Kegiatan di Bidang Pangan, Kawasan Industri, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekaligus memohon arahan lebih lanjut dari Presiden terkait “Rencana Percepatan Transformasi Digital Nasional” T.A. 2021 senilai Rp. 25.086.951.466.000,00 (dua puluh lima triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan akselerasi kebijakan digitalisasi nasional merupakan keniscayaan serta telah mendapat perhatian khusus Presiden, apalagi hal tersebut sesungguhnya telah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang mana transformasi digital ini merupakan salah satu infrastruktur dasar dalam mengimplementasikan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

14)Usulan Waktu Penyelenggaraan *Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)* ke-7 Tahun 2022 di Indonesia

GPDRR diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaksanaan agenda *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang memuat 4 aksi prioritas yakni: i) pemahaman terhadap risiko bencana; ii) memperkuat tata kelola risiko bencana; iii) investasi pengurangan risiko bencana untuk ketahanan; dan iv) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam rangka pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan GPDRR berpeluang menjadi sarana diplomasi kerja sama Indonesia dengan negara peserta dalam hal kebencanaan sebagaimana terjadi pasca gempa bumi di Yogyakarta (kerja sama bidang kegunungapian

dengan pemerintah Jepang), terlebih Indonesia berada pada 4 pertemuan lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina yang sangat berpengaruh pada intensitas kebencanaan geologis di Indonesia.. Kepercayaan global terhadap tata kelola resiko bencana yang dilakukan Pemerintah Indonesia menguat pasca Kementerian LHK menerima pendanaan senilai USD 103,8 juta dari Green Climate Fund atas proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) jauh dari nilai yang diperoleh Brazil di tahun sebelumnya sebesar USD 96,5 juta.

15) Laporan Hasil Rakorsus Tingkat Menteri membahas Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2020

Menko Polhukam menyampaikan surat Laporan Hasil Rakorsus Tingkat Menteri Membahas Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2020 yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2020 dan dihadiri para menteri/pimpinan lembaga terkait serta pemda provinsi yang rawan dan terdampak karhutla. Puncak musim kemarau diprediksi BMKG terjadi bulan Agustus-Oktober 2020,. Selain itu, ekologi gambut melalui restorasi lahan yang dilakukan BRG perlu diantisipasi dengan strategi kebijakan yang berkesinambungan. Berkenaan dengan hal dimaksud, Seskab telah melaporkannya melalui memo kepada Presiden dan menyampaikan surat kepada Menko Polhukam untuk menginformasikan tindak lanjut atas surat Menko Polhukam dimaksud.

**Gambar 7. Laporan Hasil Rakorsus Tingkat Menteri
Mengenai Antisipasi Karhutla**



16) Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung Penunjang Siaran LPP RRI

Direktur Utama LPP RRI telah menindaklanjuti surat Seskab perihal Tanggapan atas Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung Penunjang Siaran, pada pokoknya telah menyiapkan dokumen sebagai persyaratan yang diperlukan, utamanya telah tersedia anggaran yang diperlukan dalam DIPA RRI T.A. 2021.

Penyiaran sebagai *core business* LPP RRI menjadi salah satu *concern* Presiden pada Ratas tanggal 3 Agustus 2020 membahas Perencanaan Transformasi Digital, bahkan dalam Ratas sebelumnya membahas Rancangan Postur APBN 2021 pada tanggal 28 Juli 2020, Presiden berharap salah satunya pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menopang *return* ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Seskab telah menyampaikan persetujuan untuk pembangunan gedung LPP RRI Pusat.

Gambar 8. Surat perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung LPP RRI



17) Aqaba Process Virtual Meeting on Covid-19 Response

Pertemuan *Aqaba Process Virtual Meeting on Covid-19 Response* merupakan pertemuan antar pemimpin negara dalam menghentikan penyebaran radikalisme secara internasional. Dalam pertemuan dimaksud disepakati peningkatan penggunaan teknologi informasi berpotensi menjadi media propaganda dan rekrutmen para kelompok teror sehingga perlu direspon secara cepat. Oleh karena itu diperlukan langkah memperkuat ketahanan dan kohesi sosial secara sinergis antara Pemerintah, kelompok

masyarakat, dan swasta melalui kerja sama pertukaran informasi, peningkatan literasi, dan penanggulangan bencana.

Kepala BNPT juga memberikan dukungan terhadap *Aqaba Process* dan bersedia bekerja sama dengan semua negara dan pemangku kepentingan, selain itu juga Kepala BNPT turut menyampaikan 3 (tiga) fokus Pemerintah terkait radikalisme yakni: i) penyesuaian kebijakan dan prioritas menghadapi ancaman penyalahgunaan internet untuk tujuan penyebaran narasi atau propaganda kelompok terorisme, ii) memperkuat ketahanan masyarakat melalui infrastruktur hukum dan kelembagaan, dan iii) pembangunan sinergi kerja sama di kawasan dan internasional terkait pertukaran informasi serta langkah-langkah yang diperlukan termasuk kekhususan dan kerentanan di berbagai wilayah.

Setkab sebagai instansi pengawas dalam kegiatan sinergisitas k/l dalam rangka penanggulangan terorisme yang dikoordinatori BNPT perlu menerima laporan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan sinergisitas dimaksud serta mengkonfirmasi lebih lanjut laporan peningkatan aktivitas jaringan terorisme.

Indikator Kinerja (2)

“Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”.

Realisasi Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan **output 42 rancangan rekomendasi** atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dari seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak **41 rancangan rekomendasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 97,61%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020)

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	41 rancangan rekomendasi	100%	97,61%
	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	42 rancangan rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungannya akan kami *highlight* berikut ini.

1) Penyusunan dan Penetapan Keppres tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia

Menlu memohon kepada Presiden untuk menyetujui pemberian bantuan penanggulangan bencana kebakaran kepada Australia berupa pengiriman Satgas Garuda (1 peleton personel TNI, tenaga medis, dan *liaison officer*). Atas dasar permohonan tersebut, Setkab kemudian menghadiri rapat penyusunan Keppres tentang pengiriman bantuan kemanusiaan bersama pada tanggal 30 Januari 2020 di Kemhan. Setelah rapat mencapai kesepakatan, Setkab melakukan finalisasi rancangan Keppres dan administrasi pemberkasan sesuai ketentuan UU, seperti memohon paraf persetujuan Menlu, Menhan, Menkeu, Panglima TNI, dan Kepala BNPB pada rancangan Keppres hingga akhirnya Presiden pada tanggal 2 Februari 2020 menetapkan Keppres tersebut bertepatan dengan keberangkatan Satgas Garuda ke Australia.

**Gambar 9. Pelaksanaan Rapat Penyusunan Keppres No. 2 Tahun 2020
pada tanggal 30 Januari 2020 di Kemhan**



2) Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pengelolaan, Kegiatan Produksi, Penjaminan, dan Preferensi Harga Industri Pertahanan

Penyusunan RPerpres tentang Pengelolaan, Kegiatan Produksi, Penjaminan, dan Preferensi Harga Industri Pertahanan merupakan pelaksanaan amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selama periode Januari-September 2020, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika secara aktif memberikan kontribusi intelektual terkait penyusunan RPerpres dimaksud melalui rangkaian Rapat Tim Kecil maupun Rapat Harmonisasi yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual bersama K/L terkait, serta memberikan tanggapan atas RPerpres secara *online*.

Adapun dalam penyusunan RPerpres dimaksud, Setkab selalu konsisten berposisi bahwa substansi RPerpres masih mengandung masalah, dengan inti:

- a) Kanalisasi 11 kewenangan hanya di tangan Menhan sangat berbahaya, karena UU Indhan dan peraturan terkait lainnya bukan mengamanatkan kepada Menhan, namun kepada KKIP yang dipimpin langsung oleh Presiden.
- b) Substansi RPerpres agar tidak dilihat secara sempit melalui perspektif pertahanan, namun perlu dilihat sebagai “*upaya pengelolaan manajemen dan bisnis industri di bidang pertahanan*”.

- c) Substansi pasal kerja sama Indhan, khususnya dengan pihak asing baik di dalam maupun di luar negeri, perlu disesuaikan arahan Presiden. RPerpres perlu memastikan bahwa pengguna mematuhi arahan Presiden untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta memesan Alpalhankam dalam jangka menengah dan panjang.
- d) Perlu menghindari pencantuman secara detail terkait jenis dan macam produk teknologi Alpalhankam di dalam draf RPerpres.

Gambar 10 Pelaksanaan Rapat Tim Kecil Penyusunan RPerpres tentang Pengelolaan, Kegiatan Produksi, Penjaminan, dan Preferensi Harga Industri Pertahanan pada tanggal 11 Maret 2020 di Kementerian Hukum dan HAM



3) Penyusunan Rancangan Keppres tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Center of Military Medicine*

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika bekerja sama dengan Asdep Bidang Hubungan Internasional menghadiri rapat penyusunan RKeppres tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Center of Military Medicine* (ACMM) bersama TNI, Kemhan, Kemlu, Kemenko Polhukam, serta Kemensetneg. Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpendapat pada forum rapat bahwa sebelum dilakukan penyusunan RKeppres lebih lanjut, perlu dilakukan hal-hal berikut:

- a) Melakukan klarifikasi apakah telah ada penilaian kelayakan usulan keanggotaan RI pada ACMM dari Menlu.

- b) Mempertimbangkan perlu atau tidaknya ditetapkan Keppres yang merupakan kebijakan tingkat tinggi Presiden hanya sebagai dasar hukum RI menjadi anggota ACMM, mengingat ACMM hanya unit organisasi *layer* ke-3 di bawah organisasi regional ASEAN.
 - c) Mengkaji kategori organisasi internasional dan non-organisasi internasional secara jelas, sebagai bagian pertimbangan perlu tidaknya penetapan dasar hukum level kebijakan Presiden, karena memiliki implikasi luas khususnya terhadap beban sistem APBN secara makro terhadap anggaran Kemhan-TNI dan Kemlu
- 4) **Rancangan Intruksi Presiden tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diselenggarakan pada tanggal 16 September 2019 yang salah satu rekomendasi kebijakannya yakni kebutuhan integrasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam 1 (satu) komando melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Gambar 11. Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla melalui Rlnpres Nomor 3 Tahun 2020



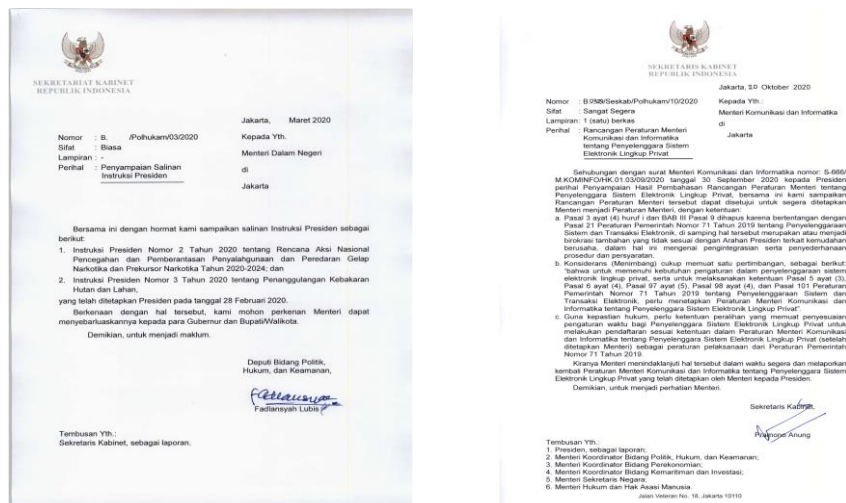
5) RInpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024

Setkab mendorong penetapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk memperkuat koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pengelolaan data pelaporan penanggulangan narkotika. Penyusunan RAN P4GN dilaksanakan bersama penyusunan RKA-K/L guna mensinergikan program kegiatan serta dukungan penganggarnya oleh k/l dan pemda.

6) Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Menkominfo menetapkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376), sesuai catatan Seskab.

Gambar 12. Hasil Rapat Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat



**7) a. Permohonan Izin Pembangunan Gedung Makogabwilhan I, II, dan III;
b. Permohonan Penetapan RKeppres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (Dua Puluh Tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A**

Asrenum Panglima TNI menyampaikan Permohonan Izin Pembangunan Gedung Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II, dan III, yang mana Kogabwilhan I di Tanjung Pinang, Kogabwilhan II di Balikpapan, dan Kogabwilhan III di Mimika belum difasilitasi gedung Makogabwilhan, rekomendasi Seskan agar hal tersebut dapat dipenuhi Presiden disetujui oleh Presiden dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) **Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (PIIKN)**

Sehubungan dengan surat Kepala BSSN kepada Presiden perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional, Setkab menyampaikan bahwa Presiden menyetujui izin prakarsa penyusunan RPerpres dimaksud dengan beberapa ketentuan, antara lain: substansi RPerpres memperhatikan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2019; melakukan penyesuaian nomenklatur; dan tidak mengatur dan/atau mengamanatkan pembentukan lembaga baru.

Gambar 13. Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang PIIKN



Indikator Kinerja (3)

“Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”

Realisasi Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan **output 38 rancangan rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dari seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak **37 rancangan rekomendasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 97,36%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini..

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Jan-Sept 2020)

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	37 rancangan rekomendasi	100%	97,36%
	Jumlah terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	38 rancangan rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan

informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1) Rapat Internal dengan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw

Dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan negara yang komprehensif dan berkelanjutan yang selaras dengan Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, pemerintah berkomitmen untuk terus membangun kawasan perbatasan menjadi beranda depan negara. Setelah selesainya pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) gelombang pertama dan saat ini tengah berlangsung pembangunan 11 PLBN gelombang kedua, pemerintah juga menyusun masterplan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Pro. Kalbar; Motaain, Prov. NTT; dan Skouw, Prov. Papua. Adapun ketiga kawasan perbatasan tersebut merupakan bagian dari tujuh PLBN gelombang pertama. Presiden selalu menekankan agar daerah PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu, Sekretariat Kabinet melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempersiapkan permohonan serta bahan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Internal dengan Presiden tentang hal tersebut.

Gambar 14. Bahan Rapat Internal dengan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw



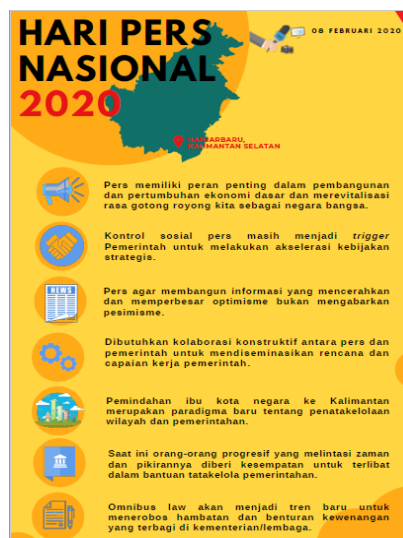
2) Usulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Tahun 2020 di Istana Negara

Antisipasi karhutla dilakukan melalui perbaikan tata kelola kegiatan usaha perkebunan di Areal Penggunaan Air (APL) dan lahan masyarakat serta pembentukan Gugus Tugas Operasional di bawah Kementerian LHK, lahan gambut di luar kawasan hutan dan lahan masyarakat akan dilakukan pemulihan dengan pembangunan sekat kanal, pintu air, dan infrastruktur lainnya. Antisipasi karhutla di kawasan rawan diupayakan melalui pemberdayaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui *Resort Based Management* (RBM) yang dilengkapi personel, sarpras, dan anggaran di wilayah rawan Karhutla. Adapun langkah antisipasi Karhutla juga dilakukan melalui pembangunan *resort*, sinergi personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kelembagaan tingkat desa, pembentukan Masyarakat Peduli Api, diseminasi pembukaan lahan tanpa bakar, patroli bersama, serta aksi kolaborasi dengan masyarakat.

3) **Penyampaian Butir Wicara Presiden pada Puncak Perayaan Hari Pers Nasional Tahun 2020**

Presiden menyampaikan arahan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 dan mengajak insan pers terlibat dalam *open government partnership* yang mana pemerintah telah terbuka bekerja sama dan mendorong kolaborasi antara pers dan pemerintah untuk mendiseminasikan rencana dan capaian kerja pemerintah dan meminimalisasi distorsi informasi kebijakan yang kerap menuai perdebatan nonsubstantif.

Gambar 15. Infografis Butir Wicara Hari Pers Nasional 2020



4) Bahan Ratas Persiapan Penyelenggaraan *Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)* ke-7 Tahun 2022

GPDRR dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan agenda Sendai *Framework for Disaster Risk Reduction* yang memuat 4 aksi prioritas yakni: i) pemahaman terhadap resiko bencana; ii) memperkuat tata kelola resiko bencana; iii) investasi pengurangan resiko bencana untuk ketahanan; dan iv) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dalam rangka pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Gambar 16. Bahan Ratas Persiapan Penyelenggaraan GPDRR

PERSIAPAN PENYELANGGARAAN 7TH GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION (GPDRR) 2022	
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - 4 agenda prioritas - - Pemahaman terhadap risiko bencana; - Memperkuat tata kelola risiko bencana; - Investasi pengurangan risiko bencana untuk ketahanan; dan - Meningkatkan kesiapsiagaan bencana	
UMUM	KHUSUS
- GPDRR bertujuan menjadi sarana diplomasi kebencanaan serta pengalaman dan best practice negara-negara dalam penanggulangan risiko. - GPDRR sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan penurunan potensi PDB akibat dampak bencana dan iklim sebesar 1,25% dari total PDB. - Indonesia telah mendapat kepercayaan tata kelola risiko bencana melalui pendanaan Green Climate Fund (GCF) atau proposal REDD+ (pengurangan emisi atau deforestasi dan degradasi hutan) sebesar USD 103,8 juta jauh melampaui Brasil pada tahun sebelumnya yang memperoleh pendanaan sebesar USD 76,5 juta. - Variasi berbagai model potensi bencana yang ada di Indonesia mendorong untuk menjadikan Indonesia sebagai <i>centre of knowledge</i> terbuka dalam bidang kebencanaan.	- BNPB perlu mengembangkan konsep subdansi dan rancangan kontribusi Indonesia dalam GPDRR. - Hasil kerja Pemerintah Indonesia yang berhasil menekan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen perlu didorong menjadi nilai tambah Indonesia mengupayakan fasilitas tertentu dalam hal perdagangan maupun ekonomi. - Banyaknya pengujian dan penelitian kebencanaan yang disusun pemerintah dan lembaga penelitian menjadi etalase jalan kerja sama dalam hal pengembangan hasil penelitian. - GPDRR harus mampu menyampaikan informasi bahwa kegiatan tersebut berdampak positif terhadap ekonomi riil.

Pengukuran Capaian Periode Oktober- Desember 2020

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Oktober-Desember 2020, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. *Outcome* yang dihasilkan adalah **37 rancangan rekomendasi** yang terdiri dari: **22** rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet; **3** rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet; **5** rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet; dan **7** rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Jumlah *outcome* 37 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada periode September sampai dengan Desember Tahun 2020 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 mencapai 100%** sebagaimana data pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Outcome	Target	Realisasi Kinerja
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	22	90%	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3	90%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	5	90%	100%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Outcome	Target	Realisasi Kinerja
	4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	7	90%	100%

Capaian Sasaran : Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

Indikator Kinerja (1)

“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

Realisasi Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika menghasilkan **47 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika. Dari **47 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **22 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet	90%	22	22	100%	111,11%

1) Saran Menhan Mengenai Kerja Sama RI-Korsel Bidang Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Menhan melalui surat R/740/M/XI/2020 tanggal 6 November 2020 berdasarkan hasil *executive summary* program serta hasil reuiu dari BPKP, melaporkan kepada Presiden bahwa program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X RI-Korsel tidak mampu mencapai target, sehingga Menhan menyarankan agar program tersebut tidak dilanjutkan. Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meneruskan laporan kepada Presiden dengan memberikan catatan bahwa saran Menhan tersebut perlu dicermati kembali dengan benar-benar memperhatikan implikasi positif maupun negative dari penghentian program kerja sama dimaksud. Program pengembangan KF-X/IF-X merupakan bagian 7 program prioritas KKIP, namun pembiayaan atas kewajiban serta penanganan permasalahannya belum dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2020, dan APBN tahun 2020, sehingga **perlu terobosan kebijakan**.

Gambar 17. Executive summary Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X yang dilampirkan sebagai bahan pengambilan kebijakan.



Indikator Kinerja (2)

“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

Realisasi Indikator Kinerja (2) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika menghasilkan **4 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika. Dari **4 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **3 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (2) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	3	3	100%	111,11%

1) Permenkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat

Hasil penelaahan terhadap Permenkominfo tersebut dengan merujuk catatan dalam surat Seskab nomor: B.0329/Seskab/Polhukam/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020:

- a. Pasal 3 ayat (4) huruf i dan BAB III Pasal 9 yang sebelumnya mengatur *“pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di luar wilayah Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Menkominfo”* telah dihapus. Namun, khusus Pasal 3 ayat (4) huruf i diubah menjadi *“keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- b. Konsiderans (Menimbang) hanya memuat satu pertimbangan.
- c. Permenkominfo memuat ketentuan peralihan dalam Bab VI Pasal 47 *“PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku”*.

Perkembangan terakhir, penomoran serta pengundangan Permenkominfo tersebut telah selesai, yakni menjadi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376), dan telah dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenkominfo pada tanggal 2 Desember 2020

Capaian Sasaran : Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

Indikator Kinerja (3)

“Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

Realisasi Indikator Kinerja (3) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika menghasilkan **8 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika. Dari **8 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **5 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (3) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	5	5	100%	111,11%

1) Penanganan Kasus PT ASABRI

PT ASABRI tengah menghadapi masalah solvabilitas, rasio kecukupan modal PT ASABRI negatif, serta memburuknya kondisi keuangan disebabkan penurunan nilai investasi secara signifikan disebabkan akibat lemahnya *corporate governance*, belum optimalnya pengawasan internal, serta adanya dugaan korupsi. Menteri Pertahanan mengusulkan proses penanganan dugaan kasus korupsi PT ASABRI diambil alih oleh Kejaksaan RI sebagaimana penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Terkait kasus PT ASABRI, KPK juga telah membentuk tim Bersama BPK untuk melakukan joint investigation dan menghitung total kerugian negara. Pemeriksaan investigatif oleh Auditorat Utama investigasi BPK sesuai kewenangannya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada unsur pidana, BPK akan melapor kepada aparat penegak hukum.

Indikator Kinerja (4)

“Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

Realisasi Indikator Kinerja (4) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika menghasilkan **11 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika. Dari **11 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **7 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (4) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (4) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	%Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	7	7	100%	111,11%

1) Laporan Kegiatan Menhan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menhan ke Luar Negeri

Guna merealisasikan arahan Presiden RI pada Ratas terkait kebijakan pengembangan Alutsista, Setkab melalui Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika rutin memonitor dan melaporkan laporan kegiatan bulanan Menhan maupun hasil kunjungan kerja Menhan ke luar negeri selama periode Oktober-Desember 2020, terutama yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan atau pengadaan Alutsista, diantaranya kunjungan kerja ke AS, Jerman, Italia, Austria, Perancis, Turki, dan Qatar pada tanggal 12-25 Oktober 2020. Data-data dan capaian hasil kegiatan dan kunjungan tersebut kemudian dirangkum ke dalam sebuah matriks kompilasi yang terintegrasi.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(Periode Oktober-Desember 2020) Capaian Bidang Fasilitas Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Selain dua sasaran dan empat indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran yakni :

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 90%; dan
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70%.

3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 90%.
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan target B.

Tabel 3.10
Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Bidang FO Tahun 2020
(Periode Oktober s.d. Desember 2020)

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%	33,33%
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan	70%	SAKIP 2019 katagori A (memuaskan) 81,02%
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%	100,00%
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil		

		koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan	Indeks Revisi B	Indeks Revisi B (7 Revisi)
--	--	--	-----------------	----------------------------

Capaian Indikator Sasaran ketiga pada Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Periode Oktober-Desember 2020 sebagaimana tergambar pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa:

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu hanya tercapai **33,33%**. Belum tercapainya target (90%) pada indikator ini karena ketepatan waktu dalam pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam yang berasal dari 4 Asisten Deputi masih mengalami kendala, dari tiga dokumen yang disampaikan pada bulan Oktober hingga Desember 2020, dua diantaranya mengalami keterlambatan penyampaian.

Kedepannya perlu ada mekanisme yang disepakati dan diimplementasikan terkait pengumpulan dan pengolahan data/bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70% memperoleh capaian 81,02%. Evaluasi dilakukan pada 3 s.d. 23 Agustus 2020. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP satuan organisasi/unit kerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. Pada evaluasi SAKIP Tahun 2019 yang dilakukan pada Agustus 2020 lalu Polhukam memperoleh nilai 81,02% dengan rincian penilaian ruang lingkup atas implementasi SAKIP yang mencakup: penilaian terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai 35,42 atau 82,86% dari bobot sebesar 42,86, penilaian terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai 28,57 atau 80,00% dari bobot sebesar 35,71, dan penilaian terhadap pelaporan kinerja memperoleh nilai 17,02 atau 79,43% dari bobot sebesar 21,43. Dokumen yang dievaluasi meliputi

dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta dokumen terkait lainnya.

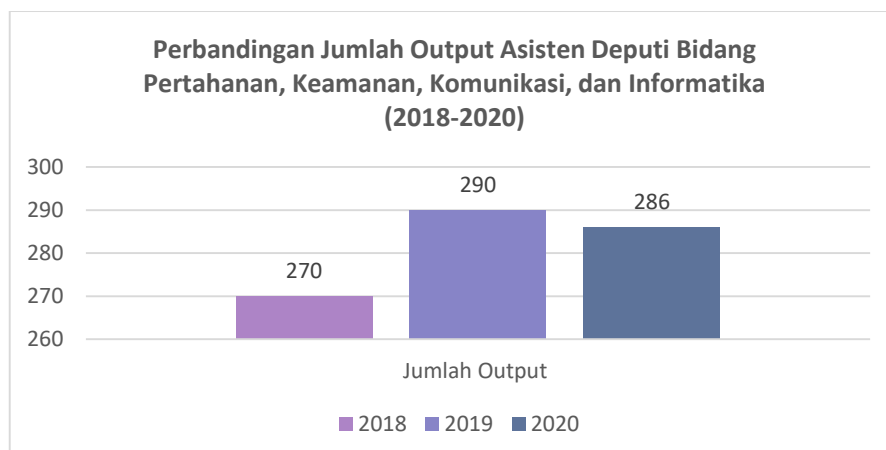
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 100%. Terpenuhinya capaian indikator ini karena grup whatsapp (wag) PIC Anggaran dari masing-masing Asisten Deputi sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan membantu dalam pemenuhan dokumen Program dan Anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.

Kedepannya perlu ada mekanisme yang disepakati dan diimplementasikan terkait pengumpulan dan penyusunan dokumen Program dan Anggaran.

5. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan capaian berupa indeks B. Dalam periode Januari-September 2020, Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam sebanyak 7 kali mengajukan revisi.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Meskipun terdapat restrukturisasi dan pandemi Covid-19 pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, hal tersebut tetap membuat jumlah keseluruhan output tahunan optimal meski mengalami sedikit penurunan..

**Gambar 3.18 Perbandingan Jumlah Output Tiga Tahun
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**



Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Munculnya isu-isu penting di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2020 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Pada Bulan September Tahun 2019, Sekretariat Kabinet menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mengingat belum ditetapkan peraturan yang terbaru.

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tahun 2020 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp 394.266.000,00. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

- (ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 393.813.350,00 atau setara 99,88% dari total pagu anggaran atau Rp 394.266.000,00. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 452.650,00 yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 286 rancangan rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2020

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 376.864.000	Rp 376.411.350 (179 rancangan rekomendasi)	97,20%	Rp 452.650
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 12.212.000	Rp 12.212.000 (61 rancangan rekomendasi)	98,36%	-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau	Rp 5.190.000	Rp 5.190.000 (46 rancangan rekomendasi)	95,65%	-

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
	Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika				
	Total	Rp 394.266.000	Rp 393.813.350 (286 rancangan rekomendasi)	97,20%	Rp 452.650

Data pada tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran komponen kegiatan, tetapi dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp 394.266.000,00 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) *Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp 376.411.350 (179 rekomendasi) ; (2) *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp 12.212.000,00 (61 rekomendasi); dan (3) *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp 5.190.000,00 (46 rekomendasi).

Pada kegiatan ketiga, atau *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* Output tidak membutuhkan anggaran dalam penyiapannya karena proses koordinasi dengan K/L terkait dapat dilakukan dengan fasilitas teknologi informasi untuk menghilangkan biaya-biaya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2020. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan pejabat eselon I Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada tahun 2020 ini, laporan kinerja yang disajikan menggunakan dua pengukuran yang dibagi menjadi : (i) pengukuran kinerja pada Bulan Januari- September 2020, dan (ii) pengukuran kinerja pada Bulan Oktober- Desember 2020.

Pengukuran Kinerja Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2020 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja. Realisasi kinerja atas sasaran strategis *“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”* tersebut mencapai nilai rata-rata 97,22%.

Adapun Realisasi kinerja untuk indikator kinerja *“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”* mencapai 97,05%, *“Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”* mencapai 97,61% dan *“Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”* juga mencapai 97,36%.

Pada pengukuran kinerja Bulan Januari-September 2020 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan *output* sebanyak 216 rancangan rekomendasi (dengan yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 210 rancangan rekomendasi), yang terdiri dari: 136 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan (132 disetujui Deputi), 42 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan (41 disetujui Deputi), dan 38 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (37 disetujui Deputi).

Untuk pengukuran Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2020 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Realisasi kinerja atas sasaran strategis *“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”* mencapai 100% dan sasaran strategis *“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”* mencapai 100%.

Adapun realisasi untuk indikator kinerja *“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”*, mencapai 100% *“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 100%, *“Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 100%, dan *“Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 100%

Pada pengukuran kinerja Bulan Oktober-Desember 2020 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan 37 sebanyak rancangan rekomendasi (dengan seluruh rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet), yang terdiri dari: 22 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), 3 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), dan 5 rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), dan 7 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab),

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020 mencapai Rp 393.813.350,00 atau setara 99,88% dari total pagu anggaran atau Rp 394.266.000,00. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 452.650,00 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja TW I - III



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

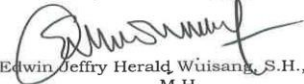
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

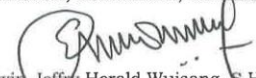
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.1.043.534.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.38.424.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf	Rp.18.042.000,-
Total Anggaran	Rp.1.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

LAMPIRAN 2. Perjanjian Kinerja TW IV



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90 Persen
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukum	Rp.242.922.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.126.027.100,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.0,-
4. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf	Rp.5.190.000,-
Total Anggaran	Rp.374.139.100,-

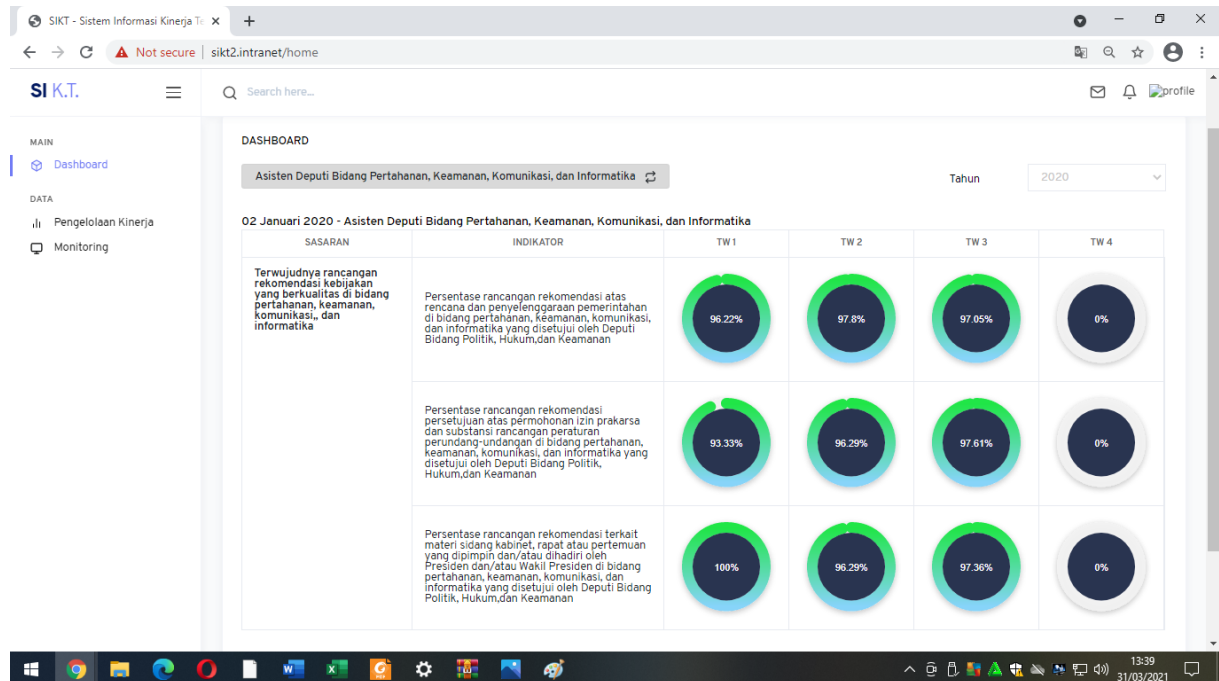
Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

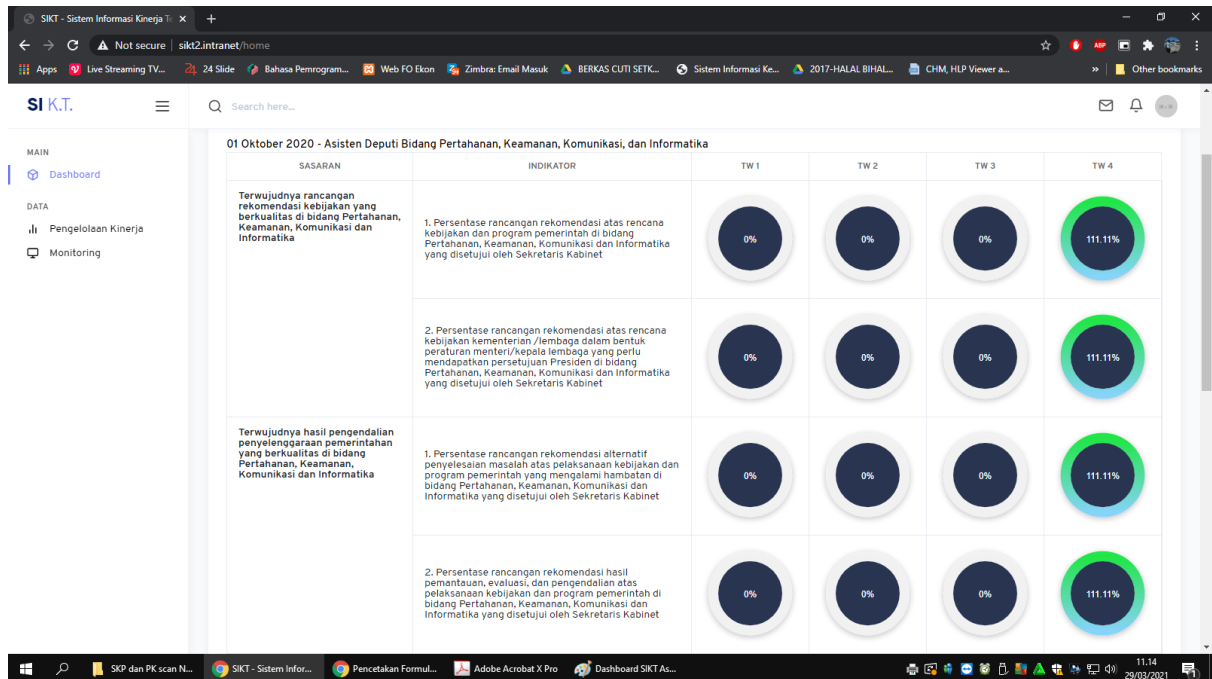
LAMPIRAN 3. Dashboard SIKT TW I - III



Monitoring

SASARAN	INDIKATOR	TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME	DOKUMEN	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW1	100%	25	25	53	51	96.22%	96.22%	[Icon]	TW1	0	0
		TW2	100%	50	50	91	89	97.8%	97.8%	[Icon]	TW2	0	0
		TW3	100%	80	80	136	132	97.05%	97.05%	[Icon]	TW3	0	0
		TW4	100%	115	115	0	0	0%	0%	[Icon]	TW4	0	0
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW1	100%	2	2	15	14	93.33%	93.33%	[Icon]			
		TW2	100%	5	5	27	26	96.29%	96.29%	[Icon]			
		TW3	100%	7	7	42	41	97.61%	97.61%	[Icon]			
		TW4	100%	10	10	0	0	0%	0%	[Icon]			
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW1	100%	2	2	12	12	100%	100%	[Icon]			
		TW2	100%	3	3	27	26	96.29%	96.29%	[Icon]			
		TW3	100%	5	5	38	37	97.36%	97.36%	[Icon]			
		TW4	100%	7	7	0	0	0%	0%	[Icon]			

LAMPIRAN 4. Dashboard SIKT TW IV



SIKT - Sistem Informasi Kinerja T...

01 Oktober 2020 - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

SASARAN	INDIKATOR	TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN	OUTCOME	AKSI	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	22	22	100%	111.11%			TW4	0	0
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW4	90%	0	0	3	3	100%	111.11%					
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW1	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW2	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%			TW3	0	0
		TW4	90%	0	0	5	5	100%	111.11%			TW4	0	0
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%					
		TW4	90%	0	0	7	7	100%	111.11%					

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA TAHUN 2020**

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vii) ✓ Capaian kinerja (hal 26) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 29) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 64) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 65)
II	Mekanisme penyusunan 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ Telah sesuai dengan PK (hal 15) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 22) ✓ Telah selaras (hal 15) ✓ Telah sesuai (hal 19) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (lamp) ✓ Telah memadai (hal 19) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 63)

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN

1. SEKRETARIAT KABINET
2. 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
3. 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan
4. 5018 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
5. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Lampiran 2 Memorandum
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor: M. 131/Adm-1/02/2020
Tanggal: 12 Februari 2020

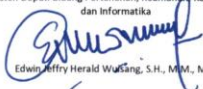
KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika														
01.01	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUJUI				13	16	21	14	13	11	22	8	13	13	14	15
CAPAIAN IKK 1				100%	88%	95%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	93%	100%	100%
01.02	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan RUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUJUI				4	3	7	5	3	4	6	3	6	7	5	7
CAPAIAN IKK 2				80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUJUI				5	3	3	1	4	9	8	3	0	2	4	2
CAPAIAN IKK 3				100%	100%	75%	100%	100%	90%	100%	100%	0%	100%	100%	100%

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika														
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	67	Rancangan Rekomendasi	19	9	9	1	1	3	5	3	6	5	3	3
CAPAIAN OUTPUT				23	24	33	20	20	25	38	14	19	23	23	24
01.001.009	Tanpa Sub Output														
01.001.009.216	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	50	Rancangan Rekomendasi	9	8	8	1	1	2	4	3	4	4	3	3
CAPAIAN KOMPONEN 1				13	18	22	14	13	11	24	8	13	14	14	15
01.001.009.217	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	10	Rancangan Rekomendasi	5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
CAPAIAN KOMPONEN 2				5	3	7	5	3	4	6	3	6	7	5	7
01.001.009.218	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	7	Rancangan Rekomendasi	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
CAPAIAN KOMPONEN 3				5	3	4	1	4	10	8	3	0	2	4	2

KODE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5018.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	67	Rancangan Rekomendasi												
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	50	Rancangan Rekomendasi	9	8	8	1	1	2	4	3	4	4	3	3
CAPAIAN IOK 1				13	18	22	14	13	11	24	8	13	14	14	15
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10	Rancangan Rekomendasi	5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
CAPAIAN IOK 2				5	3	7	5	3	4	6	3	6	7	5	7
01.001.03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam	7	Rancangan Rekomendasi	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
CAPAIAN IOK 3				5	3	4	1	4	10	8	3	0	2	4	2

Jakarta, Januari 2021
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi,
dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wulandari, S.H., M.M., M.H.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2020

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
06.5018	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
001.009	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
216	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1.021.034.000	376.864.000	355.701.350	20.710.000	376.411.350	99,87	452.650
217	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	38.424.000	12.212.000	12.212.000	0	12.212.000	100,00	0
218	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf	18.042.000	5.190.000	5.190.000	0	5.190.000	100,00	0